

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) merupakan perusahaan yang berfokus pada penyediaan jaringan, jasa, dan konten telekomunikasi, khusus untuk mendukung teknologi dan sistem informasi PT PLN (Persero) dan *public*. Sebagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh PLN, pada awalnya ICON+ berfokus untuk melayani kebutuhan PLN akan jaringan telekomunikasi. Seiring dengan kebutuhan industri akan jaringan telekomunikasi dengan tingkat *availability* dan *reliability* yang konsisten, Perseroan melihat peluang baru untuk mengembangkan usahanya yaitu dengan mengomersialkan kelebihan kapasitas jaringan telekomunikasi ketenagalistrikan serat optik milik PLN di Jawa dan Bali (Icon+, 2017).

Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, perusahaan ICON+ juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatannya. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data yang diinginkan (Megawaty & Putra, 2020). Salah satu kegiatan yang dilakkan monitoring adalah monitoring pelaksanaan kebijakan. Dari hasil wawancara kepada Bapak Gatot selaku Manager HC Policy dan Comunication ICON+, diperoleh penjelasan, mengenai kebijakan (didalam perusahaan) adalah aturan produk hukum di perusahaan, bentuknya adalah yang tertinggi, perjanjian kerja bersama, lalu ada keputusan direksi dan ada edaran direksi, serta SOP/juklak/juknis. Diperlukannya monitoring pelaksanaan kebijakan adalah untuk pelaksanan kebijakan itu akan menjadi evaluasi bagi pegawai ICON+, apakah ada yg melenceng atau ada yg tidak kompatibel atau malah sulit dilaksanakan, dengan begitu pelaksanaan kebijakan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Bapak Gatot menjelaskan bahwa kegiatan monitoring pelaksanaan kebijakan masih menggunakan sistem konvensional. Penggunaan sistem konvensional membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih, sehingga kurang efektif dalam melakukan pekerjaan. Kekurangan lainnya yaitu biaya yang dikeluarkan lebih

banyak seperti untuk pembelian kertas sebagai media kerja. Selain itu, pencarian data arsip membutuhkan lebih banyak waktu, bahkan proses *approval* juga kurang efisien karena harus bertemu langsung dengan pemangku jabatan dan *manager*.

Perkembangan teknologi yang semakin maju menuntut perusahaan untuk berkembang menjadi perusahaan yang menggunakan sistem digital dalam setiap aktivitas kerjanya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang *realtime*, cepat, dan efisien (Hanifah & Handaga, 2020). Sistem digitalisasi sendiri memberi keuntungan, dimana setiap pekerja dapat melakukan kegiatan secara *online* kapanpun dan dimanapun. Pencarian data juga dipermudah dengan memanfaatkan kode unik disetiap data. Salah satu pekerjaan di ICON+ yang belum menggunakan sistem ini adalah monitoring pelaksanaan kebijakan. Kegiatan tersebut memakai lebih banyak waktu karena dibagian *approval* harus dilakukan secara bertahap. Data pelaksanaan kebijakan tahun sebelumnya juga susah dicari karena disimpan diarsip perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi terdapat upaya untuk menciptakan suatu aplikasi monitoring kebijakan yang dapat digunakan secara *online*. Aplikasi tersebut memungkinkan untuk mengkonversi media kertas menjadi digital untuk dapat dilihat dilayar monitor, sistem ini juga dapat mempermudah pekerjaan secara cepat, dan aman. Aplikasi tersebut memudahkan pekerja, sehingga lebih efektif dalam melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dikarenakan data mudah dicari, selain itu juga mengurangi biaya dalam penggunaan media kertas. Pada proses *approval* oleh pemangku jabatan juga semakin mudah karena dapat diajukan langsung secara *online*. Didalam aplikasi ini juga terdapat chart review dan report bulanan sebagai acuan agar lebih dapat berjalan lebih baik kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di teliti sebagai berikut.

- a. Bagaimana merancang aplikasi monitoring kebijakan di ICON+
- b. Bagaimana membangun dan mengimplementasikan aplikasi di ICON+.

1.3 Batasan Masalah

Batasan dari fitur Aplikasi Monitoring Kebijakan Human Capital (HC) diantaranya :

- a. Fungsi yang dapat mengakses Aplikasi ini hanya fungsi-fungsi di bawah Divisi *Human Capital* yang menjalankan kebijakan *Human Capital*.
- b. Pemangku jabatan yang memiliki kewenangan untuk mengakses aplikasi sebagai user yaitu pejabat level *Supervisory* atau jika tidak memiliki *supervisor*, maka kewenangan diberikan kepada fungsional yang ditunjuk. Fungsi yang dapat digunakan yaitu fungsi “input”, “edit”, dan “submit”.
- c. Manager memiliki kewenangan untuk melakukan “approval” (*approve* atau *reject*) terkait proses.
- d. *Role Administrator* atau admin aplikasi yang ditunjuk memiliki kewenangan dalam “create”, “input”, “edit”, “submit”, “approval”, dan “unduh”.
- e. Akses “login” Aplikasi menggunakan akses login email korporat.
- f. Halaman pilih *role* untuk user yang memiliki lebih dari 1 *role* setelah berhasil login.

1.4 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- a. Merancang aplikasi di ICON+ agar dapat melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan secara online.
- b. Mempermudah monitoring pelaksanaan kebijakan sehingga proses pengelolaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penyusunan tugas akhir diantaranya :

- a. Pengguna (Pemangku Jabatan dan Manager) dapat melakukan pelaksanaan kebijakan secara online
- b. Pengguna dapat lebih efisien ketika mencari data yang diinginkan.
- c. Pengguna dapat meminimalkan waktu dalam pelaksanaan kebijakan.